

Analisis Alokasi Anggaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sarolangun

Lailatul Anip

Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

Email :

Abstract

This thesis is entitled analysis of budget allocations and regional development priorities of Sarolangun Regency in 2007-2012. The aim of this study was to find out the analysis of the priority budget allocation for regional development in Sarolangun Regency, the development of the priority budget for regional development. The method used is descriptive analysis and uses developmental analysis. The results of this study show that the priority budget for regional development is increasing every year, especially for the first priority in 2010 by 47%, in 2011 by 26% and in 2012 by 29%. regional development priorities every year or in the future the number of special regional expenditures for regional development priority budgets will increase.

Keywords: Allocation, budget, regional development priorities

Abstrak

Skripsi ini berjudul analisis alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2007-2012. Penelitian ini tujuan adalah untuk mengetahui analisis alokasi anggaran prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Sarolangun perkembangan anggaran prioritas pembangunan daerah. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan menggunakan analisis perkembangan Hasil penelitian ini menunjukkan anggaran prioritas pembangunan daerah semakin meningkat tiap tahunnya terutama pada prioritas pertama pada tahun 2010 sebesar 47% pada tahun 2011 sebesar 26% dan pada tahun 2012 sebesar 29%. dapat diartikan bahwa anggaran prioritas pembangunan daerah tiap tahun atau kedepannya angka belanja daerah khusus untuk anggaran prioritas pembangunan daerah akan meningkat.

Kata Kunci : Alokasi, anggaran, prioritas pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 juncto Undang -undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Sebenarnya pertimbangan mendasarkan terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari pemeritah daerah, dengan keterbukaan dan mandiri, selain itu keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan pembangunan daerah. Selanjutnya kemeningkatan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Tujuan dari program ekonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

daerah kualitas pelayanan publik agar lebih efisien hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemaeintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya sendiri.

Adapun misi utama otonomi daerah tidak hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisien dan afektifitas sumber daya keuangan daerah, untuk itu kita memerlukan keuangan yang handal dalam melaksanakan pengelolaan sumber keuangan daerah, adapun dari analisis ini pemerintah daerah dapat di dasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara, memanfaatkan, keterbatasan Sumber–sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntunan Good Gonernance dalam rangka efektifitas dan efisien pembangunan daerah memerlukan persyaratan tata pemerintah ysng baik dan bersih pada dasarnya terdapat tiga pilar dalam meningkatkan good governance, ada nya partipasi, tranpirasi dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini diharapkan Kabupaten dan Kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak akan jalan dengan baik tanpa didukung anggaran yang cukup, sebagaimana terdapat didalam APBD. namun demikian tidak semua daerah dapat menjalankannya dengan baik sebagaimana harapan masyarakat hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karnanya tidak semua sector pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara kebersamaan. Untuk itu perlu ada penetapan prioritas pembangunansebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.

Anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran baik negara (APBN) maupun daerah (APBD) yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasa adalah satu tahun. Dengan demikian dalam Budget ini akan tercermin alokasi-alokasi anggaran pembangunan yang harus merupakan prioritas yang strategis. Dalam konteks pembuatannya biasanya yang menyiapkan rencana Budget ini adalah eksekutif termasuk datam menetapkan alokasi-alokasi anggarannya yang kemudian diajukan kepada lembaga legislatif untuk dipertimbangkan kemudian menetapkan dan memutuskannya sebagai Undang-undang (APBN) dan sebagai Peraturan Daerah (APBD). Didalam Anggaran Penerimaan dan Belanja baik Negara maupun Daerah terdapat dua aspek yang sangat penting didalam menentukan alokasi anggaran yakni: a. Pengeluaran rutin yang terdiri dari: Belanja pegawai/pension, Belanja barang Subsidi Daerah, Subsidi Daerah otonom, Bunga/Cicilan hutang, Lain-lain b. Pengeluaran Pembangunan yang terdiri dari: Program pembangunan , Bantuan proyek

Prioritas utama dalam pembuatan budget ini adalah menentukan alokasi-alokasi yang bersifat strategis yang tentunya diluar yang sifatnya rutin yakni alokasi anggran pembangunan, karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat dan daerah.

Dalam mencermati hal itu sektor-sektor pembangunan yang betul-betul nil. Harus merupakan prioritas utama dalam alokasi anggaran seperti: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perluasan Kesempatan Kerja Usaha Ekonomi Produktif Bantuan lainnya yang bersifat non rutin dan non subsidi.

Pengalokasian anggaran pembangunan tersebut harus mendorong kepada upaya pemberdayaan potensi daerah baik sumber daya alam maupun manusia, karena Otonomi

Daerah menuntut kemandirian sehingga pada akhirnya masyarakat dapat benar-benar merasakan hasil-hasil pembangunannya.

Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010, realisasi APBD Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Walaupun tiap tahunnya APBD mengalami kenaikan tetapi perkembangannya kurang stabil, jika tahun 2007 perkembangannya mencapai 52,57% pada tahun 2008 perkembangannya turun menjadi 29,11% kemudian 2009 meningkat menjadi 10,19% kemudian tahun 2010 mencapai 11,48%. jadi perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun mengalami tidak stabil dan belanja daerahnya semakin meningkat tiap tahunnya.

Kemudian, jika dilihat dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun sebagaimana terdapat pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun diantaranya prioritas pembangunan infrastruktur. Dilihat dari prioritas pembangunan infrastruktur yang pertama yaitu tanah tahun 2009 sebesar 3.588 miliar, dan tahun 2010 sebesar 999.974 juta, kemudian prioritas infrastruktur yang kedua yaitu gedung tahun 2009 sebesar 78,293 miliar dan tahun 2010 sebesar 59,266 miliar, dan prioritas pembangunan yang ketiga yaitu, jaringan tahun 2009 sebesar 70,849 miliar dan tahun 2010 sebesar 28,834 miliar. maka dilihat bahwa prioritas pembangunan daerah infrastruktur Kabupaten Sarolangun mengalami tidak stabil tahun ketahun.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang ada pada dinas, dan literatur serta data-data lain yang dapat memberi penyelesaian dalam penelitian ini menggunakan data 2007-2012 data yang diperlu yaitu:

- a. Data APBD Kabupaten sarolangun tahun 2007-2012
- b. Data RPJMD Kabupaten sarolangun tahun 2007-2012
- c. Data prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun

Sumber Data

Data yang di gunakan data sekunder, data yang diperoleh dari

- 1. DPPKAD Kabupaten Sarolangun
- 2. BAPPEDA Kabupaten Sarolangun

Analisis Data

Untuk menjawab analisis perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun digunakan analisis:

$$D = \frac{APBD_t - APBD_{t-1}}{APBD_{t-1}} \times 100\%$$

D =

Dimana :

PAPBD : Perkembangan APBD

PAPBD t : APBD Tahun PAPBD t₁ : APBD Tahun t₁

Untuk menganalisis kesuaian antara anggaran dengan prioritas pembangunan dianalisis secara deskriptif.S

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2012

Berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, realisasi APBD Kabupaten Sarolangun dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun selama 5 tahun mengalami kenaikan,dapat dilihat dari tabel 5.1

Tabel 5.1. Perkembangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sarolangun Tahun2010-2012

Tahun	pendapatan BelanjaDaerah	embanganAPBD
2010	576.690.838.732.23	20,38
2011	676.808.287.593.77	29
2012	849.118.327.566.00	25,45

Berdasarkan dari perhitungan tabel 5.1 maka diketahui perkembangan Anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 selalu mengalami perubahan tahun ketahunnya,perkembangan APBD tersebut terlihat ada kenaikan tiap tahunnya, dimana untuk tahun 2010 tingkat perkembangannya sebesar 20% dan pada tahun 2011 tingkat perkembangannya meningkat sebesar 29% namun tahun 2012 menurun sebesar 25,45.

Maka penjelasan-penjelasan tentang APBD Kabupaten Sarolangun dari tahun 2010- 2012 di dapat digambarkan bahwa perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan dan kenaikan dapat di artikan bahwa APBD Kabupaten Sarolangun tiap tahunnya mengalami ketidak stabil, diharap kondisi ini setiap tahunnya stabil,sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan.

Anggaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun

.. Berdasarkan kondisi tersebut patut diduga bahwa nilai tambah PDRB-nya lebih banyak lari keluar Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan dari anggaran untuk prioritas pembangunan daerah dimana dari tahun 2010-2012 di Kabupaten Sarolangun dilihat dari Tabel dbawah ini 5.1

Anggaran prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Sarolngun tahun 2010-2012

PRIORITAS	SKPD	Tahun		
		2010	2011	2012
PRIORITAS 1	Dinas PU dan PERA	198,241,000,000	84,415,000,000	146,313,997,000
	Dinas pendidikan	62,256,000,000	80,202,600,000	53,534,719,509
	Dinas kesehatan	1,752,000,000	682,000,000	35,519,753,000
	perindakop	1,150,000,000	2,920,000,000	2,374,000,000

	dinas perhubungan	3,575,000,000	5,480,000,000	547,000,000
	disporada	6,110,000,000	3,030,000,000	11,230,000,000
Total		273,084,000,000	176,729,600,000	249,519,469,509
PRIORITAS 2	dinas pertanian	3,143,000,000	5,278,000,000	1,703,000,000
	disbunhut	518,000,000	1,640,000,000	22,167,900,000
	diskanak	906,000,000	1,485,797,500	5,119,416,000
Total		4,567,000,000	8,403,797,500	28,990,316,000
PERIORITAS 3	Dinas pendidikan	490,000,000	6,214,750,000	1,294,000,000
	BK2D	300,000,000	250,000,000	3,468,150,000
	bappeda	1,779,000,000	310,000,000	165,000,000
	Dinas kesehatan	324,030,440	250,700,000	1,892,000,000
Total		2,893,030,440	7,025,450,000	6,819,150,000
PERIORITAS 4	SEKDA	432,000,000	515,000,000	18,504,387,000
	capil	679,000,000	740,000,000	5,997,000,000
	kelurahan	16,000,000	44,500,000	50,000,000
	kecamatan	101,000,000	94,000,000	53,000,000
	bappeda	387,000,000	2,226,000,000	100,000,000
Total		1,615,000,000	3,619,500,000	24,704,387,000
PRIORITAS 5	BPP	902,000,000	225,000,000	90,000,000
	Pemberdayaan Perempuan Dan Kb	1,106,000,000	18,193,500,000	1,024,719,000
	Kesbangpol	575,000,000	576,612,000	1,121,713,000
	POL PP	316,000,000	260,000,000	691,732,000
Total		2,899,000,000	19,255,112,000	2,928,164,000

Sumber :BEPEDA Kabupaten Sarolangun (Data diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa anggaran prioritas 1 tahun 2010 untuk dinas PU dan PERA,dinas kesehatan,perindakop dinas perhubungan,disporada adalah sebesar 273,084,000,000, selanjutnya prioritas 2 tahun 2010 untuk dinas pertanian , dinas perkebunan dan kehutanan, dinas perternakan, adalah sebesar 4.567.000.000, selanjutnya untuk prioritas 3 dinkes ,bk2d, bappeda adalah sebesar 2.893.030.000 selanjutnya untuk prioritas 4, sekda, capel, kelurahan, kecamatan, dan bappeda adalah sebesar 1.615,000,000, selanjutnya untuk prioritas 5 yaitu bpp, bppkb, kesbangpol, pol pp, sebesar 2.899,000,000, kemudian 2011 prioritas 1 pu dan pera, diknas, dinkes, perindankop ,dinas perhubungan, dan disporada adalah sebesar 176.729.600.000, selanjut untuk prioritas 2 dinas pertanian ,dinas kehutanan dan dinas perternakan adalah sebesar 8.403.797.500, prioritas 3 dinas kesehatan, bk2d, dan bappeda adalah sebesar 7.025.450.000, untuk prioritas 4 dinas sekda, capil , kelurahan kecamatan , bappeda 2.226.112.000 untuk prioritas 5, bpp, bppkb kesbangpol 19,255,112,000, selanjutnya untuk prioritas pembangunan yang 2012 untuk prioritas 1 pu dan pera ,dinas kesehatan, dinas pendidikan, perindankop, dishub ,dan disporada sebesar 249,519,469,509 dan prioritas ke 2, dinas pertanian, dinas kehutanan, dinas peternakan adalah sebesar 28,990,316,000, selanjutnya prioritas ke 3 dinas kesehatan, bpk2d, bappeda adalah sebesar 6,819,150,000,

kemudian prioritas ke 4 sekda, capil, kelurahan, bappeda, sebesar 24,704,387,000. Prioritas ke 5, bppkb, kesbangpol, pol pp, sebesar 2,928,164,000 maka dapat disimpulkan bahwa diantara ke lima prioritas tersebut anggaran yang tertinggi adalah pada prioritas pertama (satu). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2. Masing-Masing Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2012

Proritas Pembangunan Daerah	2010	2011	2012
Prioritas 1	273,084,000,000	176,729,600,000	249,519,469,509
Prioritas 2	4,567,000,000	8,403,797,500	28,990,316,000
Prioritas 3	2,893,030,440	7,025 450,000	6,819,150,000
Prioritas 4	1,615,000,000	2,226,000,000	24,704,387,000
Prioritas 5	2,899,000,000	19,255,112,000	2,928,164,000
Total	285,058,030,440	207,425,209,500	312,961,486,509

sumber : Bappeda 2010 (data yang diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5.2 maka diketahui masing-masing prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 dimana pada tahun 2010 prioritas pertama 237M, tahun 2012 prioritas pertama turun menjadi 176 M, kemudian pada tahun 2012 prioritas pertama meningkat menjadi 249 M, maka dari itu dapat dilihat perbandingan dari tiap tiap prioritas dimana prioritas pertama selalu dengan jumlah yang besar tiap tahunnya, dan dapat juga dilihat dari prioritas ke lima dan ke empat terdapat kesenjangan dimana prioritas ke lima dengan jumlah besar, dimana pada tahun 2010 prioritas kelima sebesar 2.M sedangkan prioritas ke empat dengan jumlah sebesar 1M, dan prioritas kelima tahun 2011 meningkat sebesar 19M, dan tahun 2012 turun sangat deratis menjadi 2M, jadi prioritas kelima lebih besar anggarannya dari prioritas ke empat.

Maka dengan penjelasan penjelasan, masing-masing prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun, tiap tahunnya mengalami peningkatan, jadi diharapkan kondisi anggaran ini pemerintah dapat mengatasi sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan dari itu dapat dilihat juga dari gambar 5.1 berkembang anggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai analisis alokasi anggaran dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Sarolangun maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Perkembangan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2010 -2012 terlihat sangat signifikan, artinya terjadi perkembangan penurunan maupun peningkatan terhadap belanja daerah dan anggaran prioritas pembangunan daerah terutama di prioritas 1, (infrastruktur), dengan proporsi tahun 2010 sebesar 47%, dan pada tahun 2011 proporsi 26%. dan 2012 dengan proporsi 29% di prioritas pertama (infrastuktur).
2. Dimana anggaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun, pada 5 prioritas ini tiap tahunnya meningkat pada tahun 2010 sebesar 285M tahun 2011 sebesar 207M, dan pada tahun 2012 sebesar 312M.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka untuk anggaran dan

prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadikan masukan untuk pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada supaya pendapatan asli daerah meningkat, belanja daerah di Kabupaten Sarolangun angkanya dapat berkurang, dan jumlahnya lebih kecil.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun harus dapat memperhatikan prioritas ke tiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia misalnya dalam meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kabupaten Sarolangun dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah dari penduduk sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah serta rata-rata jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Adi Priyo, 2005. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD. *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Padang
- Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah 2006 Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. *Accounting Conference*, Depok : Universita Indonesia
- Arsyad Lincoln, 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFYogyakarta.
- Ari Djaury, 2010 kesiapan pemerintah dalam meneliti pembangunan daerah .Yogyakarta
- Bratakusumah & Solihin, 2002 *Perencanaan Pembangunan Daerah*: GramediaPustaka Utama,jakarta
- BAPPEDA Provinsi Jambi.Kabupaten Sarolangun 2001. *Rencana Strategis Provinsi Jambi 2001-2005*.
- _____,2004. *Laporan Program Prioritas Provinsi Jambi*.
- _____,2005. *RPJMD Provinsi Jambi 2005 – 2010*
- _____,2005. *Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja*
- BAPPEDA KABUPATEN SAROLANGUN, 2004. *Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati.SAROLANGUN*
- Bratakasuma.D.S. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Gramedia, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2004. *Program Kerja dan Rencana Tindak Lanjut Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 2005 — 2010*.
- Djojohadikusumo.Sumitro. 2004. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES* Jakarta
- Glasson, Jhon,2000. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan oleh Paul Sihotang,

LPFE UI Jakarta.

Gubsu ,2013. meneliti tujuh program prioritas pembangunan daerah.kota sumut

Halim, Abdul 2001.*Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : AMP YKPN

Imam Ghozali,, 2005, *Analisis Multivariat Dengan SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Hanafiah, T. 2001. *Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Perdesaan.Kumpulan bahan Kuliah dan Kursus-kursus Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perdesaan*. Fakultas Pertanian IPB. Bogor.

Harsono 2011 meneliti prioritas pembangunan daerah dijabarkan kedalam RPJMD,DKI JAKARTA.

Sayuti Daulani 2005 meneliti pembiayaan pembangunan daerah Kaabupaten.sumut

Todaro. M. 2003. *Economic Develpoment in the Third Word*, Six Edition. Longman. Joyo mono